

**Beberapa** waktu yang lalu, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah kota/kabupaten untuk bersiap siaga menghadapi bencana gempa dan tsunami yang berpotensi terjadi di berbagai kawasan Sumatera Barat. Substansi dari surat ini adalah agar pemda meningkatkan kewaspadaan serta melakukan berbagai persiapan yang diperlukan seperti menyiapkan petugas yang bekerja 24 jam, pemantauan perkembangan gejala alam, mempersiapkan peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana baik dalam bentuk logistik, tempat pengungsian maupun selter-selter.

Tulisan ini mencoba mengulas tentang aspek manajemen logistik di dalam penanganan bencana alam, khususnya gempa dan tsunami.

Masalah utama dalam periode pasca bencana adalah perihal logistik. Dari pengalaman berbagai kejadian bencana sebelumnya kita ketahui bahwa masalah logistik adalah masalah yang sangat pelik. Kejadian bencana Merapi Jogjakarta 2010 sebagai contoh. Terdapat 235.858 jiwa pengungsi yang tersebar di 735 titik pengungsian (BNPB, November 2010).

Barang bantuan tersedia, namun distribusinya rumit dan tidak merata. Terjadi *mismatch* antara jumlah bantuan dengan jumlah pengungsi di masing-masing pengungsian. Sebelumnya, ketika dilanda gempa besar tahun 2006, sistem logistik kebcanaan di wilayah ini juga tidak efektif, bahkan sampai hari ke 4 pasca bencana, masih terdapat lokasi pengungsian yang belum tersentuh bantuan.

Pada saat terjadi bencana gempa di wilayah pantai Barat Sumatera beberapa waktu lalu, kerumitan masalah logistik juga terjadi. Bantuan untuk korban tsunami di Mentawai menumpuk di Sikakap. Bantuan sulit mencapai tujuan karena tidak bisa melalui darat, sementara cuaca cukup ekstrim membuat penyaluran dengan helikopter pun juga tidak dapat dilakukan.

### **Manajemen Logistik: Masalah di Mana-mana**

Sejatinya, kesulitan dalam penanganan logistik bencana bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Saat terjadi gempa bumi yang melanda Haiti, media banyak yang menyoroti kurangnya respon memadai bahkan dari organisasi kemanusiaan terhadap kebutuhan para korban gempa. Media

mencoba mengingatkan, seharusnya organisasi kemanusiaan telah mengambil banyak pelajaran dari bencana-bencana besar sebelumnya, seperti tsunami tahun Aceh 2004 dan Badai Katrina tahun 2005. Namun kembali penanganan logistik pasca bencana berjalan tidak efektif.

Pengalaman dari Badai Katrina di Amerika Serikat. Badai ini melanda wilayah tenggara Amerika Serikat pada tanggal 24-31 Agustus 2005. Peringatan akan datangnya badai telah diumumkan jauh hari sebelumnya. Badai ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar, yang meliputi lebih dari 200.000 km<sup>2</sup> wilayah tenggara Amerika Serikat. Daerah yang terpengaruh termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida dan Georgia. Nilai kerusakan yang ditimbulkan mencapai US\$200 miliar dan menyebabkan setidaknya 1289 orang telah meninggal dunia.

Penanganan pengelolaan pasca terjadinya bencana ini ditangani oleh FEMA (Federal Emergency Management Agency), yang merupakan bagian dari US Department of Homeland Security. Meskipun berbagai persiapan sudah dilakukan, dengan personel yang terlatih, ternyata FEMA belum siap menghadapi bencana ini, khususnya yang berhubungan dengan masalah pendistribusian logistik pasca bencana. FEMA ternyata menunjukkan ketidakmampuan dan kurangnya persiapan untuk menghadapi bencana Badai Katrina tersebut.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Department of Homeland Security Chertoff, "Meskipun FEMA telah memiliki personel, asset dan sumber daya yang besar dan telah dipersiapkan sebelum terjadi Badai Katrina, ternyata saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa FEMA kewalahan menghadapi badai besar tersebut. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan apakah FEMA memiliki kemampuan dan alat yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. (Special Report of The Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, 2006).

### **Aspek Manajemen Logistik Bencana untuk Sumatera Barat**

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa persoalan manajemen logistik selalu menjadi titik kerumitan dalam penanganan pasca bencana. Dalam konteks ini sepertinya kita harus melakukan persiapan yang sangat serius menyiapkan aspek manajemen logistik di wilayah pantai Barat Sumatera. Mengingat potensi bencana gempa yang diikuti tsunami - sudah sama dimulainya - sangat besar kemungkinannya terjadi di wilayah ini.

Edaran yang disampaikan Gubernur Sumbar ini hendaknya dimaknai dengan melakukan evaluasi dan monitoring atas kesiapan menghadapi bencana itu sendiri. Terkait dengan ini, aspek manajemen logistik bencana perlu mendapatkan perhatian serius.

Monitoring dan evaluasi ini meliputi: aspek perencanaan dan pendistribusian logistik, evaluasi atas kecukupan sistem dan prosedur yang diperlukan, kajian kesiapan wilayah sekitar untuk mendukung logistik, ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana distribusi, informasi, sistem pergudangan dan pengelolaan persediaan serta ketersediaan dana.

Monitoring dan evaluasi rutin atas kesiapan menghadapi bencana ini setidaknya akan dapat mengurangi kesulitan dan resiko yang timbul pascaterjadinya bencana.

**HENMAIDI**

(Doktor Teknik dan Manajemen Industri, Dosen Teknik Industri Unand)